



Media Massa : **RADAR** Hari : **Kamis** Tanggal : **29-11-2012** Halaman : |

Siap Rombak Birokrasi

Kedepankan Transparansi, Utamakan Sistem Online

JOGA - Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti kembali mendapatkan tantangan. Sebagai pemegang kendali tertinggi Pemkot Jogja, dia ditantang bisa mereformasi birokrasi di jajarannya.

Tantangan itu diimbangi dengan pemberian penghargaan. Jika mampu mereformasi birokrasi, pemkot bakal dipilih menjadi proyek percontohan reformasi birokrasi di DIJ.

▶ Baca Siap... Hal 11



Haryadi Suyuti Wali Kota Jogja

■ SIAP...
Sambungan dari hal 1

"Tanpa ada komitmen dari kepala daerah, mustahil akan terjadi reformasi birokrasi. Kepala daerah yang menentukan reformasi bisa berjalan," tandas Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Program Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah Nadimah saat evaluasi Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Ne-

gara Daerah (Forkompanda) di Balai Kota Jogja kemarin (28/11).

Haryadi, yang hadir dalam forum itu, menanggapi tantangan itu dengan baik. Menurutnya, sebagai wali kota dia sudah me-

merintahkan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memulai program perombakan itu. Dia berencana melakukan reformasi birokrasi dimulai dengan membuat rumusan untuk penilaian man-

diri di masing-masing SKPD. "Penilaian tersebut juga akan dilakukan secara *online* sehingga bisa diamati secara vertikal (atasan) maupun horisontal (antar-SKPD)," tegas Haryadi.

Untuk mereformasi birokrasi, Haryadi berpendapat, capaian kinerja bakal dirombak habis. Transparansi bakal lebih dikedepankan. Salah satu caranya yakni menerapkan sistem *online* atau disebut *elektronik performance (e-performance)*.

Artinya, tandasnya, segala hal terkait birokrasi akan didasarkan pada *e-performance* tersebut. "Misalnya, sistem promosi jabatan. Bisa diakses dari *e-performance* itu. Siapa yang layak secara syarat atau memenuhi, bisa dilihat secara *online*," sambung Haryadi.

Reformasi birokrasi, menurut suami dari Tri Kirana Muslidatun ini, tak sekadar mendorong kinerja pelayanan di Pemkot Jogja kepada masyarakat menjadi lebih transparan. Program ini juga menyangkut serapan anggaran di setiap instansi.

Saat ini serapan anggaran dinilai masih sangat rendah. Hingga akhir November ini anggaran yang terserap senilai Rp 663 miliar. Jumlah itu sekitar 70,96 persen dari total anggaran belanja APBD 2012 yang mencapai Rp 934,3 miliar.

"Bagi instansi yang serapannya rendah maka akan mendapat peringatan," katanya.

Selain layanan, Haryadi menambahkan, akuntabilitas juga akan dijalankan dengan maksimal. Ini dilakukan sejak proses rekrutmen pegawai hingga pengisian jabatan.

Strategi ini diharapkan mampu menjadikan distribusi pegawai dilakukan secara terbuka dan transparan. "Semuanya nanti berbasis *online* sehingga pusat juga bisa mengawasi. Penilaian secara akumulatif akan dilakukan secara periodik setiap enam bulan. Saat ini sedang kami dorong menjadi tiga bulanan," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Nadimah juga menuturkan, peran kepala daerah sangat penting untuk memastikan adanya perombakan birokrasi di level daerah. Menurut dia, kepala daerah memiliki wewenang untuk membuat kinerja birokrasi lebih transparan dan efisien. "Seluruh kewenangan berada di kepala daerah," ujarnya.

Dia menegaskan lagi, kepala daerah juga bisa merumuskan kebijakan mengenai program-program di daerah. Mereka dapat menerbitkan kebijakan baik berupa peraturan daerah, peraturan wali kota, dan produk-produk hukum lain demi mendukung kinerja birokrasi yang ideal. "Keterbukaan akses publik ini tergantung dari kepala daerah," sambungnya.

Nadimah menyatakan, reformasi birokrasi di tingkat nasional dimulai sejak 2008. Hanya, program reformasi birokrasi belum banyak diterapkan di daerah. Sebab, daerah baru memulai reformasi birokrasi pada 2012. "Perombakan sistem birokrasi secara maksimal tergantung kepala daerahnya," pesan dia. (eri/amd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. <u>Bag. Organisasi</u>	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. <u>Inspektorat</u>			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 23 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005